

ABSTRAK

P EMBATALAN AKTA HIBAH PASCA TERBITNYA SERTIPIKAT HAK MILIK (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Depok No.14/PDT.G/2007/PN.DPK)

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui tentang akibat hukum pembatalan akta hibah pasca terbitnya sertipikat hak milik oleh pengadilan negeri dan perlindungan hukum bagi anak angkat pasca putusan pembatalan akta hibah.

Jenis Penulisan dalam penelitian ini adalah normatif. Untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah yang ada, penulis menggunakan bahan hukum untuk menemukan jawaban tersebut pada buku-buku maupun literatur-literatur mengenai mengenai hukum perjanjian dan konsep hukum hibah. Untuk memahami pendekatan yang digunakan oleh penulis menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*)

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pembatalan akta hibah pasca terbitnya sertipikat hak milik oleh pengadilan negeri depok adalah Sah dan mengikat demi hukum. Dalam kasus ini disebabkan oleh salah satu pihak ahli waris membuat Akta Hibah dengan memalsukan tanda tangan dari salah satu ahli waris sehingga berakibat hukum tidak sah dan batal demi hukum dan menjadi akta di bawah tangan.

Perlindungan hukum bagi anak angkat dalam hal ini dimaksudkan adalah untuk mencari suatu keadilan terhadap putusan hakim yang memenangkan gugatan penggugat terhadap pembatalan akta hibah atas sertipikat hak milik yang telah dibalik nama yaitu sebagai berikut :

- a. Berhak untuk mendapatkan kembali harta warisan Sesuai Putusan Pembatalan Akta Hibah oleh Pengadilan yang menegaskan serta menguatkan kembali sebagai ahli waris.
- b. Berhak untuk mengajukan pembukaan blokir pada kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) setelah adanya putusan Pengadilan Negeri Depok
- c. Berhak untuk mendaftarkan kembali sertipikat hak milik tersebut agar dilakukan pencoretan nama pemilik sertipikat dan mengembalikan kepada yang berhak.
- d. Berhak untuk menjual obyek sengketa tersebut dengan sepengetahuan atau seijin dari dua belah pihak.

Kata Kunci : **Pembatalan, akta hibah, anak angkat.**

ABSTRACT

”CANCELLATION OF THE DEED OF GRANT AFTER THE ISSUANCE OF A CERTIFICATE OF OWNERSHIP”

(Analysis Of The Decision of The District Court Depok No.14/PDT.G/2007/PN.DPK)

The pupose of this study is to find out about the legal consequences of canceling the grant deed after the issuance of the certificate of ownership by district court and legal protection for adopted children after the decision of cancellation the grant deed. The type of writing in this study is normative. To find answers to the formulation of existing problems, the authors use legal material to find these answers in the literature on the law of agreement law and the concept of grant law. To understand the approach used by the writer using the case approach and conceptual approach. Based on the results of the study it can be concluded that the cancellation of the deed of grant after the issuance of the certificate of ownership by the Depok District Court is legal and binding by law. In this case, it was caused by one of the heirs making a deed of a grant by falsifying the signature of one of the heirs so that it resulted in the law being invalid and null and void and becoming a deed under the hand. Legal protection for adopted children in this case is to seek justice for the decision of the judge who won the plaintiff's claim against the cancellation of the deed of the certificate of ownership certificate that has been reversed, namely as follows :

- a. Entitled to recover the inheritance according to the court's decision which confirms and reinforces as heirs.
- b. Entitled to appley for unblocking at the National Land Agency (BPN) office after the depok district court ruling.
- c. The right to re-register the certificate of ownership so that the name of the certificate owner is crossed out and returned to the rightful person.
- d. Have the right to sell the object of the dispute with the knowledge or permisson of both parties.

Keyword : Cancellation, Grant deed, Adopted Child.